

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya prinsip responsibility, pada Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi baja hollow, PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon menghadapi tantangan operasional dengan risiko tinggi. Latar belakang penelitian ini diambil dari pengamatan bahwa penerapan GCG dalam pengelolaan operasional K3 di perusahaan ini belum dilakukan secara efektif atau maksimal, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan mengganggu pencapaian target perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip GCG diterapkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut.

4.1.1. Sejarah PT Putra Steelindo Perkasa

PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2018 berdasarkan Akte Pendirian Nomor 16 tanggal 20 Maret 2018 di bawah notaris Hj. Juriah Sadeli, SH. Sejak awal berdiri, perusahaan ini berfokus pada bidang industri baja dan logam, sejalan dengan potensi kawasan Cilegon yang dikenal sebagai pusat industri baja di Indonesia. Pada masa pendiriannya, komposisi kepemilikan saham didominasi oleh Safril Malik selaku Direktur Utama dengan kepemilikan sebesar 90%. Sementara itu, Munarsih MY menjabat sebagai

Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 5%, dan Unggul Yudo P sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebesar 5%. Struktur kepemilikan ini menjadi pondasi awal dalam mengembangkan arah dan strategi perusahaan.

Seiring perkembangan bisnis dan kebutuhan untuk memperkuat struktur kepemilikan, pada tahun 2020 PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon melakukan perubahan melalui proses akuisisi. Perubahan tersebut tercatat dalam Akte Perubahan Nomor 1761 tanggal 31 Oktober 2020 di bawah notaris Irwan Sugandi, SH, M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan resmi melalui SK Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-AH.01.03.0410417 tanggal 23 November 2020. Dengan adanya akuisisi ini, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham, di mana Safril Malik selaku Direktur kini memiliki porsi saham sebesar 50%, dan Mitologenta masuk sebagai Komisaris dengan porsi kepemilikan saham sebesar 50%.

Perubahan kepemilikan tersebut menjadi tonggak penting bagi perusahaan dalam memperkuat struktur organisasi serta memperluas jangkauan bisnisnya. Dengan dukungan kepemilikan saham yang lebih seimbang, PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon terus berupaya meningkatkan kinerja, memperluas jaringan, serta berkontribusi dalam industri baja di Indonesia.

4.1.2. Visi dan Misi PT Putra Steelindo Perkasa

4.1.2.1. Visi PT Putra Steelindo Perkasa

Menjadikan perusahaan PT. Putra Steelindo Perkasa menjadi perusahaan terbaik dalam hal penjualan, produksi dan jasa yang mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat.

4.1.2.2. Misi PT Putra Steelindo Perkasa

Dengan fokus pada produktivitas dan masyarakat, perusahaan menjalin kemitraan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok bahan baku dan penyalur produk. Perusahaan memproduksi berbagai jenis produk steel yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan mutu terbaik, harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengolahan profesional demi kepuasan pelanggan. Selain itu, perusahaan berusaha memberi penghargaan kepada stakeholder secara memadai, penyediaan lingkungan kerja yang aman dan memberi kesempatan untuk pengembangan karir. Keunggulan perusahaan ini adalah selalu memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat melalui pencipta lapangan kerja dan dukungan pembinaan sosial

4.1.3. Nilai dan Komitmen PT Putra Steelindo Perkasa

Nilai

“Menjunjung tinggi integritas, kualitas, inovasi dan profesionalisme”

Komitmen

“Kami memastikan pengelolaan usaha yang efisien, inovatif, serta bertanggung jawab dengan tujuan menciptakan manfaat jangka panjang bagi pelanggan, mitra, karyawan, dan lingkungan.”

4.1.4. Profil Perusahaan

PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja dengan fokus utama pada produksi material berbasis plat baja, terutama pipa kotak atau hollow. Sejak berdiri, perusahaan telah beroperasi selama kurang lebih tujuh tahun dan menunjukkan perkembangan yang konsisten.

Berlokasi di Cilegon, kawasan yang dikenal sebagai pusat industri baja di Indonesia, PT. Putra Steelindo Perkasa memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur nasional.

Dalam perjalanannya, perusahaan berhasil memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah Banten dan Jawa Tengah, dengan rata-rata penjualan mencapai 200–300 ton produk baja per bulan. Angka ini mencerminkan kapasitas produksi yang stabil sekaligus kepercayaan dari para pelanggan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk-produk yang ditawarkan antara lain plat lembaran (sheet), CNP, UNP, pipa bulat, dan pipa kotak (hollow). Seluruh produk diproses dengan standar kualitas tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan beragam sektor industri, mulai dari pembangunan perumahan, infrastruktur jalan, hingga kebutuhan manufaktur.



Gambar 4. 1 Logo PT Putra Steelindo Perkasa

Sumber: Dokumen Perusahaan

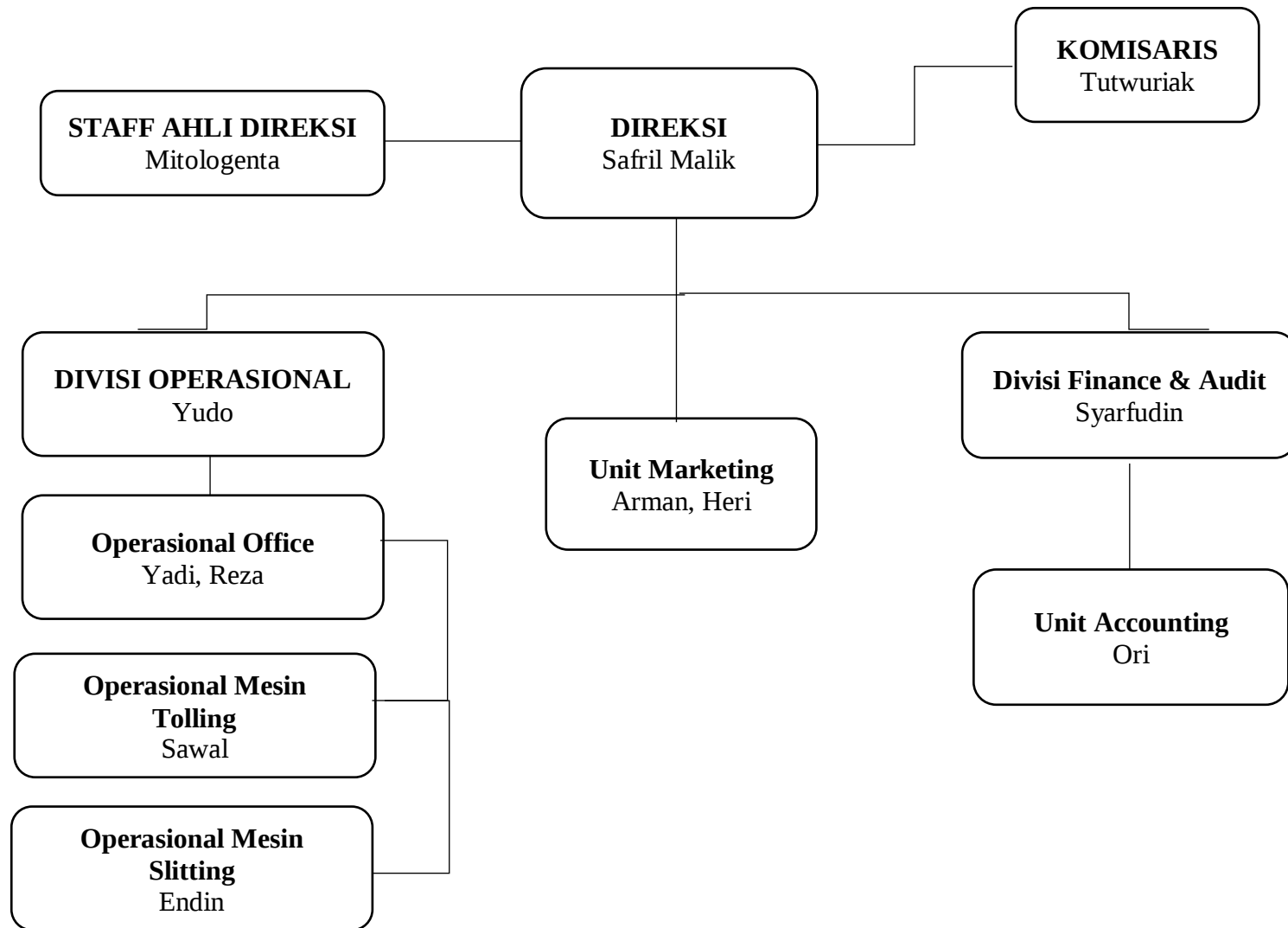
Perkembangan pesat sektor properti dan infrastruktur di Indonesia menjadi peluang yang sangat potensial bagi perusahaan. Peningkatan pembangunan perumahan baru dengan desain minimalis di berbagai daerah merupakan indikasi

kuat bahwa kebutuhan terhadap material baja akan terus meningkat. PT. Putra Steelindo Perkasa hadir sebagai mitra strategis yang menyediakan material konstruksi baja yang andal, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

Selain mengutamakan kualitas produk, perusahaan juga menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan inovasi. Didukung oleh tenaga ahli berpengalaman, PT. Putra Steelindo Perkasa mengelola setiap lini bisnis secara profesional, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke pasar. Perusahaan juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang berlaku.

Komitmen perusahaan tidak hanya berhenti pada penyediaan produk berkualitas, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis yang berorientasi jangka panjang. Dengan harga yang kompetitif, pelayanan yang profesional, serta kepercayaan yang telah dibangun bersama pelanggan dan mitra usaha, PT. Putra Steelindo Perkasa bertekad untuk terus berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan properti dan infrastruktur di Indonesia.

4.1.5. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Perusahaan

4.1.6. Layanan Produk dan Jasa di PT Putra Steelindo Perkasa

4.1.6.1. Besi Hollo

PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon memiliki berbagai jenis produk baja yang digunakan secara luas dalam industri konstruksi maupun manufaktur. Salah satu produk utama yang dihasilkan adalah besi hollo, yaitu baja berbentuk kotak atau persegi panjang yang tersedia dalam beragam ukuran dan ketebalan. Produk ini banyak dipilih karena fleksibilitas penggunaannya, antara lain untuk pembuatan rangka atap, pagar, konstruksi bangunan, hingga komponen industri otomotif. Besi hollow yang diproduksi menggunakan bahan dasar galvanil maupun galvanis, sehingga memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap korosi dan dapat digunakan untuk kebutuhan konstruksi jangka panjang.

4.1.6.2. Besi Pipa

Perusahaan juga memproduksi besi pipa, yakni pipa baja berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai elemen struktural maupun instalasi perpipaan. Besi pipa ini dirancang untuk mendukung berbagai keperluan teknis, baik di sektor konstruksi, infrastruktur, maupun industri yang memerlukan sistem distribusi fluida.

4.1.6.3. UNP (Profil Baja)

Produk berikutnya adalah UNP (profil baja) yang berbentuk menyerupai huruf “U” dan lazim digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi serta industri. Profil baja ini memiliki kekuatan struktural yang baik sehingga sering diaplikasikan sebagai penopang beban atau elemen rangka dalam pembangunan gedung maupun fasilitas industri.

4.1.6.4. Canal/UC

PT Putra Steelindo Perkasa juga memproduksi Canal/UC, yaitu profil baja yang sering digunakan sebagai struktur penunjang dalam proyek-proyek konstruksi. Produk ini berfungsi memperkuat bangunan sekaligus memberikan dukungan tambahan bagi elemen struktural lainnya, sehingga penggunaannya sangat penting dalam proyek berskala besar.

4.1.6.5. Plate Sheet & Coil

PT Putra Steelindo Perkasa juga memproduksi plate sheet & coil, yaitu lembaran dan gulungan baja yang berkualitas tinggi. Produk ini dapat dibuat dengan berbagai ukuran sesuai kebutuhan konsumen, sehingga sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi industri maupun konstruksi. Plate sheet & coil sering dijadikan bahan dasar dalam pembuatan komponen mesin, konstruksi bangunan, hingga manufaktur otomotif, karena ketahanannya yang tinggi terhadap tekanan dan beban.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti membahas dan menggali permasalahan mengenai Prinsip Good Corporate Governance yaitu Responsibility pada divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Pada penelitian ini, peneliti membagi permasalahan menjadi 3 rumusan, yang pertama yaitu bagaimana penerapan prinsip Responsibility diterapkan pada divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Kemudian yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip Responsibility pada divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Dan yang

terakhir yaitu dampak penerapan prinsip Responsibility terhadap kinerja keselamatan dan Kesehatan kerja di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon.

4.2.1. Penerapan Prinsip Responsibility pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa penerapan prinsip responsibility atau tanggung jawab pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon belum terlaksana dengan baik dan konsisten. Meskipun perusahaan telah memiliki kebijakan serta prosedur dasar terkait keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala baik dari sisi manajemen maupun karyawan.

Secara formal, perusahaan memang sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) terkait K3 serta menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan. Namun, hasil wawancara dengan beberapa pegawai menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur keselamatan belum berjalan secara disiplin. Masih sering dijumpai pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap ketika bekerja di area produksi, terutama pada pekerjaan yang dianggap “berisiko rendah”. Hal ini menandakan bahwa kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja masih rendah dan pengawasan dari pihak K3 belum dilakukan secara maksimal.

Selain itu, pelaksanaan safety inspection dan safety meeting belum berjalan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa responden menyebutkan bahwa kegiatan tersebut terkadang hanya dilakukan saat terjadi insiden atau menjelang audit internal. Padahal, sesuai prinsip responsibility dalam Good

Corporate Governance, perusahaan seharusnya melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan untuk mencegah risiko kecelakaan kerja, bukan hanya bertindak secara reaktif ketika masalah sudah terjadi.

Informan 1 menjelaskan bahwa “Sampai saat ini perusahaan belum pernah memberikan pelatihan K3 secara resmi kepada karyawan. Informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja biasanya hanya disampaikan secara lisan oleh supervisor saat briefing pagi”. Dalam hal pelatihan, perusahaan memang telah mengadakan sosialisasi terkait prosedur K3, tetapi frekuensi dan cakupan pelatihan tersebut masih terbatas. Sebagian karyawan baru belum mendapatkan pembekalan yang memadai mengenai budaya keselamatan kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam memastikan seluruh karyawan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai K3 belum terpenuhi secara optimal.

Dari sisi manajemen, penerapan prinsip tanggung jawab juga masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan evaluasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan 3 bahwa “Terkait pelaporan insiden kerja masih sering tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang jelas, bahkan seringkali dianggap oleh manajemen sebagai pelanggaran ringan namun beresiko tinggi”. Tim K3 belum memiliki sistem monitoring yang efektif untuk mengukur kepatuhan karyawan terhadap aturan keselamatan. Selain itu, pelaporan insiden kerja belum terdokumentasi dengan baik dan sering kali tidak dilanjutkan dengan tindakan korektif yang jelas. Beberapa informan menyampaikan bahwa ketika terjadi pelanggaran ringan terhadap aturan K3, sanksi yang diberikan belum tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pekerja lain.

Kurangnya koordinasi antara Divisi K3 dan manajemen operasional juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip responsibility. Dalam beberapa kasus, keputusan terkait keselamatan sering kali ditunda atau diabaikan karena pertimbangan target produksi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi perusahaan masih lebih menitikberatkan pada pencapaian output daripada kepatuhan terhadap prinsip tanggung jawab dan keselamatan kerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibility di Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon masih bersifat administratif dan belum terinternalisasi sepenuhnya dalam budaya kerja perusahaan. Meskipun komitmen terhadap keselamatan telah dinyatakan dalam kebijakan perusahaan, implementasinya belum dijalankan secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan, pelatihan, serta penegakan disiplin agar prinsip responsibility benar-benar dapat terwujud dan mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif di lingkungan kerja perusahaan.

4.2.2. Tantangan Penerapan Prinsip Responsibility pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Divisi K3 dan beberapa karyawan di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, ditemukan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan prinsip responsibility secara optimal. Tantangan-tantangan tersebut muncul dari aspek internal perusahaan maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Rendahnya kesadaran dan kedisiplinan pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja.

Meskipun perusahaan telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan prosedur K3, masih banyak pekerja yang mengabaikan penggunaan APD karena merasa tidak nyaman, terburu-buru mengejar target produksi, atau menganggap pekerjaan yang dilakukan tidak berbahaya. Berdasarkan pernyataan informan 1 yang menyatakan bahwa “Hambatan utama yang sering dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab K3 adalah kurangnya kesadaran dan kedisiplinan karyawan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja. Masih ada sebagian pekerja yang menganggap penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak terlalu penting”. Sikap tersebut menunjukkan bahwa budaya keselamatan belum tertanam kuat di lingkungan kerja, dan rasa tanggung jawab individu terhadap keselamatan diri sendiri maupun rekan kerja masih perlu ditingkatkan.

2. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan dari manajemen

Berdasarkan keterangan beberapa informan, inspeksi keselamatan tidak selalu dilakukan secara rutin dan terkadang hanya bersifat formalitas menjelang audit. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan 3 yang menjelaskan bahwa “Keterlibatan manajemen dalam pengawasan implementasi K3 bisa dibilang masih lemah. Mereka belum melakukan pengawasan rutin atau inspeksi langsung ke lokasi kerja”. Sanksi terhadap pelanggaran aturan K3 pun belum diterapkan secara tegas, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pekerja yang melanggar. Hal ini memperlihatkan

bahwa tanggung jawab manajemen terhadap penerapan prinsip keselamatan belum sepenuhnya dijalankan dengan konsisten.

3. Terbatasnya jumlah personel dan sarana pendukung di Divisi K3

Jumlah petugas K3 yang ada belum sebanding dengan luas area kerja dan jumlah karyawan yang diawasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan 2 yang menyatakan bahwa “Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan fasilitas pendukung K3, seperti APD yang kadang belum lengkap atau perlu diperbarui”. Akibatnya, pengawasan di lapangan menjadi kurang efektif dan beberapa potensi bahaya tidak segera teridentifikasi. Selain itu, peralatan keselamatan seperti helm, sepatu safety, sarung tangan, dan alat pelindung telinga masih terbatas dalam jumlah maupun kualitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan fasilitas kerja yang aman belum terlaksana dengan optimal.

4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarbagian

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa perubahan prosedur atau hasil evaluasi K3 tidak selalu tersampaikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Divisi operasional dan K3 kadang belum berjalan dalam satu jalur koordinasi yang solid, sehingga tindakan pencegahan kecelakaan tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Minimnya komunikasi ini membuat pelaksanaan K3 sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan 3 yang menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan tanggung jawab K3, hambatan lain yang sering ditemui adalah

kurangnya komunikasi antara manajemen dan pekerja terkait pelaporan kondisi berbahaya di lapangan”.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *responsibility* pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Upaya peningkatan kesadaran, pengawasan, serta penegakan disiplin perlu dilakukan secara sistematis agar seluruh elemen perusahaan, mulai dari manajemen hingga pekerja di lapangan, memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja.

4.2.3. Dampak Penerapan Prinsip Responsibility pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon

Penerapan prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap karyawan, khususnya dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Pada Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, penerapan prinsip *responsibility* memberikan dampak yang cukup signifikan, baik secara positif maupun dalam bentuk tantangan yang masih perlu diperbaiki.

Dampak positif penerapan prinsip *responsibility* dapat dilihat dari adanya komitmen perusahaan dalam menyediakan kebijakan dan prosedur K3 sebagai pedoman pelaksanaan keselamatan kerja. Perusahaan telah menyusun aturan terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), prosedur kerja aman, serta pembagian

tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan K3. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen telah menyadari pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Selain itu, penerapan prinsip *responsibility* juga berdampak pada meningkatnya kesadaran sebagian karyawan terhadap pentingnya keselamatan kerja. Adanya sosialisasi K3, meskipun belum dilakukan secara rutin, telah mendorong pekerja untuk lebih memahami risiko kerja yang dihadapi serta pentingnya mematuhi aturan keselamatan. Kesadaran ini menjadi salah satu indikator bahwa penerapan prinsip *responsibility* mulai memberikan pengaruh terhadap budaya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan prinsip *responsibility* pada Divisi K3 belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya pelanggaran terhadap prosedur K3, seperti penggunaan APD yang tidak konsisten dan kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja di area produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam pengawasan dan penegakan kebijakan K3 masih perlu ditingkatkan.

Dampak lain yang perlu menjadi perhatian adalah lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan K3. Penerapan prinsip *responsibility* seharusnya tidak hanya berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan yang berkelanjutan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran K3. Kurangnya pengawasan dan ketegasan dalam penegakan aturan dapat menurunkan efektivitas penerapan K3 dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan dan edukasi K3 juga berdampak pada belum maksimalnya penerapan prinsip *responsibility*. Pelatihan yang tidak dilakukan secara berkala menyebabkan sebagian karyawan belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur keselamatan kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan perannya dalam memastikan seluruh pekerja memperoleh pengetahuan dan keterampilan K3 yang memadai.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *responsibility* pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon telah memberikan dampak awal yang positif dalam bentuk kebijakan dan peningkatan kesadaran keselamatan kerja. Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan dalam pengawasan, penegakan aturan, dan pelatihan K3. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat komitmen manajemen, meningkatkan pengawasan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar penerapan prinsip *responsibility* dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara langsung di lingkungan kerja PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, khususnya pada Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *responsibility* sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG) telah mulai dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal. Secara umum, perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja melalui

penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan, pemasangan rambu-rambu keselamatan di area produksi, serta adanya kegiatan briefing atau toolbox meeting sebelum pekerjaan dimulai. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan potensi kecelakaan kerja.

Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari karyawan. Beberapa pekerja masih ditemukan tidak menggunakan APD secara lengkap, terutama ketika melakukan pekerjaan ringan atau pada jam kerja yang dianggap tidak berisiko tinggi. Pengawasan dari pihak manajemen juga belum dilakukan secara rutin, sehingga pelanggaran terhadap prosedur K3 sering kali tidak disertai sanksi yang tegas. Selain itu, kegiatan evaluasi terhadap efektivitas penerapan K3 belum dilakukan secara sistematis dan berkala, sehingga perusahaan belum memiliki data yang cukup untuk mengukur keberhasilan kebijakan keselamatan yang diterapkan.

Dalam hal pengelolaan dokumen K3, Divisi K3 telah memiliki sistem pencatatan sederhana terkait laporan insiden, pemeriksaan peralatan, serta data penggunaan APD. Akan tetapi, sistem ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam bentuk digital, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan dan analisis data secara cepat.

Selain aspek teknis, dari hasil observasi juga terlihat bahwa kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja masih perlu ditingkatkan. Karyawan cenderung mematuhi aturan K3 hanya ketika diawasi langsung oleh

petugas K3 atau atasan, dan belum menjadikannya kebiasaan yang dilakukan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa budaya keselamatan (safety culture) di perusahaan masih dalam tahap pembentukan dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari nilai-nilai organisasi.

Secara keseluruhan, hasil observasi menggambarkan bahwa PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon telah melakukan langkah awal dalam menerapkan prinsip *responsibility* melalui kebijakan dan kegiatan K3 yang mendukung keselamatan kerja. Namun, penerapan tersebut masih memerlukan peningkatan dalam aspek pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan penerapan sistem izin kerja (PTW) secara menyeluruh. Perusahaan perlu memperkuat komitmen manajemen serta membangun kesadaran pekerja agar prinsip tanggung jawab tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan budaya kerja yang aman, disiplin, serta berkelanjutan.

4.3 Output Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis terhadap penerapan prinsip *responsibility* di Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, diperoleh bahwa perusahaan telah memiliki komitmen awal terhadap penerapan keselamatan kerja, namun belum memiliki sistem pengendalian kerja yang terstruktur untuk memastikan tanggung jawab keselamatan diterapkan di setiap aktivitas pekerjaan. Hal ini terlihat dari belum diterapkannya *Permit To Work* (PTW) secara menyeluruh sebagai dokumen dan prosedur resmi yang mengatur izin kerja berisiko tinggi.

Sebagai hasil dari penelitian ini, output yang dihasilkan berupa usulan implementasi sistem *Permit To Work* (PTW) sebagai instrumen utama penerapan prinsip *responsibility* dalam sistem manajemen K3. PTW merupakan sistem perizinan kerja yang bertujuan untuk memastikan setiap pekerjaan, terutama yang memiliki risiko tinggi seperti pengelasan, pemotongan, pemeliharaan mesin, pekerjaan di ruang terbatas, atau pekerjaan di ketinggian, dilakukan dengan pengendalian yang tepat dan diawasi oleh pihak yang berwenang.

4.3.1 Mekanisme *Permit To Work* (PTW)

Mekanisme *Permit To Work* (PTW) merupakan prosedur resmi yang digunakan untuk memberikan izin pelaksanaan suatu pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, dikendalikan, dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat sebelum pekerjaan dimulai. Penerapan sistem PTW ini menjadi bentuk nyata dari prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance*, karena setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap keselamatan kerja.

Berikut adalah mekanisme PTW yang diusulkan untuk diterapkan di Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon:

1. Permohonan Izin Kerja

Pelaksana atau penanggung jawab pekerjaan (biasanya mandor atau kepala bagian produksi) mengajukan permohonan izin kerja kepada Divisi K3 sebelum pekerjaan dimulai. Permohonan harus mencakup:

- a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- b. Lokasi dan waktu pelaksanaan.

- c. Potensi bahaya yang mungkin muncul.
- d. Langkah pengendalian risiko yang direncanakan.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Petugas K3 bersama pengawas lapangan melakukan identifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risikonya. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan apakah pekerjaan dapat dilanjutkan dan tindakan pengendalian apa yang harus diterapkan.

3. Pemeriksaan Area Kerja (Pre-Work Inspection)

Sebelum izin dikeluarkan, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan:

- a. Area kerja aman dan bebas dari bahaya potensial.
- b. Peralatan dalam kondisi baik.
- c. APD tersedia dan sesuai standar.
- d. Sumber energi atau bahan berbahaya telah dikendalikan (misalnya *lock out-tag out*).

4. Penerbitan dan Persetujuan Izin Kerja

Setelah area dinyatakan aman, dokumen PTW diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu:

- a. Pelaksana pekerjaan.
- b. Pengawas lapangan.
- c. Petugas K3.
- d. Supervisor atau kepala bagian terkait.

5. Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengawasan

Selama pekerjaan berlangsung, pengawasan harus dilakukan oleh pengawas lapangan dan petugas K3 untuk memastikan semua langkah keselamatan dijalankan sesuai izin yang telah diberikan.

6. Penutupan dan Evaluasi Izin Kerja

Setelah pekerjaan selesai, pelaksana wajib melaporkan penyelesaian kepada pengawas dan K3 untuk dilakukan pemeriksaan ulang area kerja. Jika area sudah aman, maka izin kerja ditutup dan disimpan sebagai dokumen arsip serta bahan evaluasi berkala.

4.3.2 *Hot Work Permit*

Jenis PTW diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dan jenis pekerjaan yang dilakukan. *Hot Work Permit* adalah izin kerja yang diberikan untuk kegiatan yang menghasilkan sumber panas, percikan api, atau nyala api yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan. Jenis pekerjaan ini meliputi aktivitas seperti pengelasan (welding), pemotongan logam (cutting), penggerindaan (grinding), penggunaan obor gas (gas torch), serta pekerjaan lain yang melibatkan peralatan listrik berdaya tinggi atau bahan mudah terbakar.

Penerapan *Hot Work Permit* sangat penting karena area kerja industri baja, seperti di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, memiliki bahan mudah terbakar, debu logam, dan peralatan panas yang berpotensi tinggi menimbulkan kebakaran.

Secara prosedural, *Hot Work Permit* harus dikeluarkan sebelum pekerjaan dimulai dan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dokumen HWP mencakup identifikasi lokasi kerja, jenis pekerjaan panas yang dilakukan, waktu pelaksanaan, daftar potensi bahaya, langkah pengendalian risiko, serta tanda tangan dari pihak

yang bertanggung jawab seperti pelaksana, pengawas, dan petugas K3. Sebelum izin dikeluarkan, dilakukan inspeksi area kerja untuk memastikan bahwa lokasi telah aman dari bahan mudah terbakar, tersedia alat pemadam api ringan (APAR) di sekitar area kerja, dan pekerja telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai seperti sarung tangan tahan panas, kaca pelindung, dan pakaian kerja tahan api.

Selama pekerjaan berlangsung, pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas lapangan atau petugas K3 untuk memastikan pekerja mematuhi seluruh ketentuan yang tertulis dalam izin kerja. Setelah pekerjaan selesai, area kerja harus diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada sisa bara api, percikan, atau material panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Setelah area dinyatakan aman, izin kerja ditutup dan disimpan sebagai dokumentasi.

Pemilihan *Hot Work Permit* sebagai fokus utama *output* penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting yang relevan dengan kondisi nyata di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, yaitu:

1. Kesesuaian dengan karakteristik kegiatan perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja dan pengolahan logam, sebagian besar proses kerja di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon melibatkan aktivitas pengelasan, pemotongan, dan perakitan yang menghasilkan panas serta percikan api. Hal ini menjadikan pekerjaan panas sebagai salah satu sumber bahaya utama yang perlu diatur secara ketat melalui sistem izin kerja yang formal.

2. Tingkat risiko yang tinggi terhadap kebakaran dan ledakan

Berdasarkan hasil observasi, area produksi perusahaan memiliki potensi bahaya kebakaran akibat adanya bahan mudah terbakar seperti debu logam, oli, dan sisa bahan pelumas. Dengan adanya sistem Hot Work Permit, setiap aktivitas yang berpotensi memicu api dapat dikendalikan melalui verifikasi area kerja, pemeriksaan alat, dan penetapan tindakan pencegahan sebelum pekerjaan dimulai. 3. Sebagai bentuk nyata penerapan prinsip responsibility

Hot Work Permit secara langsung menggambarkan pelaksanaan prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance (GCG)*, karena setiap izin yang diterbitkan melibatkan tanggung jawab berjenjang dari pelaksana, pengawas, hingga manajemen. Setiap tanda tangan dalam dokumen HWP adalah bentuk komitmen bahwa seluruh pihak telah memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman sesuai standar keselamatan.

Dengan demikian, penerapan *Hot Work Permit* diusulkan sebagai prioritas utama dalam pengembangan sistem PTW di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Izin kerja ini dinilai paling relevan dengan karakteristik risiko di lapangan dan secara langsung mencerminkan penerapan prinsip *responsibility* dalam tata kelola keselamatan kerja. Melalui penerapan izin kerja panas yang terstruktur dan terawasi dengan baik, perusahaan dapat menekan potensi kecelakaan kerja, memperkuat budaya keselamatan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance*..

Gambar 4. 3 Gambar Hot Work Permit

HOT WORK PERMIT (HWP)
PT. PUTRA STEELINDO PERKASA CILEGON

A. INFORMASI UMUM

No	Keterangan	Isi
1	Nomor Kerja	HWP/...../...../2025
2	Tanggal Pengajuan	
3	Jenis Pekerjaan	☐ Pengelasan ☐ Pemotongan ☐ Grinding ☐ Lainnya:
4	Lokasi Pekerjaan	
5	Penanggung Jawab Pekerjaan	Nama:..... Jabatan:.....
6	Pengawas Lapangan	
7	Jumlah Pekerja Terlibat	
8	Waktu Pelaksanaan	Tanggal:..... Jam:..... s/d

B. Identifikasi Bahaya dan Tindakan Pengendalian

No	Potensi Bahaya	Langkah Pengendalian yang Diperlukan	Sudah Dilaksanakan
1	Percikan api/panas dari pengelasan	Pasang pelindung percikan dan sekat tahan api	
2	Kebakaran akibat bahan mudah terbakar	Bersihkan area dari bahan mudah terbakar	
3	Ledakan akibat tekanan udara	Gunakan tabung gas sesuai standar dan pastikan regulator aman	
4	Luka bakar pada pekerja	Gunakan APD lengkap	
5	Bahaya listrik	Pastikan kabel dan sambungan Listrik aman dan tidak rusak	
6	Lingkungan kerja panas	Sediakan alat pemadam kebakaran (APAR) dan ventilasi memadai	

C. Perlengkapan Keselamatan

☐ APAR tersedia di lokasi
☐ Area kerja bebas bahan mudah terbakar
☐ Ventilasi memadai

☐ APD lengkap (helm. Sarung tangan, kaca pelindung, pakaian)
☐ Pengawas lapangan hadir selama pekerjaan

D. Persetujuan Izin Kerja

DIAJUKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH
Pelaksana Pekerjaan	Pengawas Lapangan (Supervisor)	Petugas K3 (Safety Officer/HSE Dept.)
Nama:	Nama:	Nama:
Tanda Tangan:	Tanda Tangan:	Tanda Tangan:
Tgl/Jam:	Tgl/Jam:	Tgl/Jam:

E. Hasil Pemeriksaan Pasca Pekerjaan

☐ Area telah diperiksa dan dinyatakan aman
☐ Tidak ada bara api, percikan atau material panas
☐ APAR dan alat kerja dikembalikan ke tempat semula

Diperikas oleh (Petugas K3):.....
 Tanggal/Jam:.....